

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

Nurakna Julianti

Email: juliantinuraknajulianti@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan Kode
Pos 91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Camat Maiwa, Sekretaris Kecamatan Maiwa, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Maiwa telah menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan cukup baik. Pada tahap perencanaan anggaran, indikator kinerja disusun dengan memperhatikan program prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pengesahan, dokumen anggaran telah disusun secara akuntabel dan transparan sesuai regulasi yang berlaku. Implementasi anggaran dilaksanakan sesuai rencana kerja dan indikator capaian, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi dilakukan secara periodik melalui laporan realisasi anggaran serta evaluasi kinerja kegiatan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan SDM dalam memahami teknis pengukuran kinerja dan kebutuhan peningkatan pelatihan teknis bagi staf perencanaan. Secara umum, proses implementasi menunjukkan konsistensi terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja, Efisiensi Anggaran

Abstract

This study aims to determine the implementation of performance-based budgeting in the administration of government affairs at the Maiwa Sub-District Office, Enrekang Regency. The informants in this study consisted of the Head of Maiwa Sub-District, the Secretary of Maiwa Sub-District, and the Head of the Planning and Finance Sub-Division. The data collection methods employed include observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used was qualitative analysis, which included stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that the Maiwa Sub-District Office has implemented performance-based budgeting quite effectively. In the budgeting phase, performance indicators were established by considering priority programs and community needs. During the approval phase, the budget documents were prepared in a transparent and accountable manner according to the applicable regulations. The budget implementation was carried out according to the work plan and achievement indicators, while the reporting and evaluation phase was done periodically through budget realization reports and performance evaluations of activities. However, there were some technical challenges, such as limited human resources in understanding performance measurement techniques and the need for further technical training for planning staff. Overall, the implementation process demonstrated consistency with the principles of efficiency, effectiveness, and accountability in performance-based budget management.

Keywords: Performance-Based Budgeting, Local Government, Performance Evaluation, Budget Efficiency

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era desentralisasi menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja. Penerapan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya [1][2]. Kewenangan tersebut menuntut tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel adalah penerapan **anggaran berbasis kinerja (ABK)**. Anggaran berbasis kinerja menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan capaian kinerja yang dihasilkan, baik dalam bentuk output maupun outcome. Anggaran sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian manajerial untuk mencapai tujuan organisasi publik [3]. Oleh karena itu, penyusunan anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja berpotensi menyebabkan rendahnya efektivitas program dan kegiatan pemerintah.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari reformasi pengelolaan keuangan publik yang bertujuan menggeser paradigma penganggaran tradisional berbasis input menuju penganggaran yang berorientasi pada hasil. Pemerintah telah memperkuat penerapan sistem ini melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara eksplisit mengamanatkan penggunaan pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penganggaran daerah [4][5].

Dalam praktiknya, implementasi anggaran berbasis kinerja tidak hanya diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, tetapi juga hingga pada organisasi perangkat daerah, termasuk kecamatan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja di tingkat kecamatan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi sektor publik. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah apabila didukung oleh sistem pengendalian dan pemahaman aparatur yang memadai [6][7]. Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengukuran kinerja, serta belum optimalnya evaluasi kinerja anggaran [8].

Perbedaan temuan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya berjalan optimal dan sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi serta kapasitas aparatur pemerintah. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih banyak dilakukan pada tingkat organisasi perangkat daerah tertentu, sementara kajian yang secara khusus mengkaji implementasi anggaran berbasis kinerja pada tingkat kecamatan masih relatif terbatas. Padahal, kecamatan memiliki kewenangan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dan pengelolaan dana publik di tingkat kecamatan, diperlukan sistem penganggaran yang tidak hanya menekankan pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian output dan outcome yang terukur. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dilaksanakan di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Selain faktor regulasi dan sistem, keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja juga sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan mekanisme pengendalian internal dalam organisasi pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman aparatur terhadap indikator kinerja, lemahnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta kurang optimalnya evaluasi kinerja menjadi hambatan utama dalam penerapan anggaran berbasis kinerja [6][8]. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan anggaran hanya berorientasi pada penyerapan dana, tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja dan manfaat program bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi implementasi anggaran berbasis kinerja perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan seluruh tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan berbasis kinerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, mekanisme, serta pemaknaan implementasi anggaran berbasis kinerja sebagaimana diterapkan dalam praktik di lingkungan pemerintahan kecamatan [6].

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, yang beralamat di Jalan Ratulangi No. 43 (Jalan Poros Rappang–Enrekang). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kantor Kecamatan Maiwa telah menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap proses penyusunan serta pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Informan penelitian terdiri dari:

1. Camat Maiwa
2. Sekretaris Kecamatan Maiwa
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pemilihan ketiga informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki peran strategis dan informasi yang relevan terkait seluruh tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja anggaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap aktivitas penyusunan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja anggaran [9].

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dianalisis meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Strategis (Renstra), laporan realisasi anggaran, serta laporan kinerja instansi pemerintah yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan analisis data yang meliputi:

1. Pengumpulan data, yaitu menghimpun seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi sistematis agar mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian serta melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh [6].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan atas hasil capaian keuangan realisasi kegiatan di tahun 2020, dapat di analisis bahwa Kantor Kecamatan Maiwa telah menggunakan anggaran sebesar 100% atau dari total anggaran kegiatan Rp 1.259.911.000,- terealisasi sejumlah Rp 1.259.911.000,-. Dari 6 (enam) program dan 31 kegiatan diketahui bahwa :

- Jumlah kegiatan terserap anggaran 100% : 31 kegiatan
- Jumlah kegiatan terserap anggaran 80-99,9% : - kegiatan
- Jumlah kegiatan terserap anggaran 50-79,9% : - kegiatan
- Jumlah kegiatan terserap anggaran 50% : - kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Maiwa, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, diperoleh gambaran bahwa implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Kecamatan Maiwa telah dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Camat Maiwa menyampaikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja telah menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kecamatan.

“Penyusunan anggaran sekarang tidak lagi hanya fokus pada habis atau tidaknya anggaran, tetapi bagaimana kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan,” (Wawancara Camat Maiwa).

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Kecamatan Maiwa menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan, setiap program dan kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas antara tujuan, indikator kinerja, serta alokasi anggaran.

“Setiap usulan kegiatan kami sesuaikan dengan Renstra dan Renja, sehingga indikator kerjanya jelas dan anggaran yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan,” (Wawancara Sekretaris Kecamatan Maiwa).

Pada tahap implementasi anggaran, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Semua kegiatan dan realisasi anggaran kami input melalui SIPD, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pemantauan pelaksanaan anggaran,” (Wawancara Kasubag Perencanaan dan Keuangan).

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya beberapa kendala teknis dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Camat Maiwa mengungkapkan bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman aparatur terkait pengukuran kinerja.

“Masih ada staf yang membutuhkan pendampingan, terutama dalam memahami indikator kinerja dan mengaitkannya dengan outcome kegiatan,” (Wawancara Camat Maiwa).

Lebih lanjut, pada tahap pelaporan dan evaluasi, informan menyampaikan bahwa laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja telah disusun secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas.

“Laporan realisasi dan laporan kinerja selalu kami susun tepat waktu, tetapi evaluasi ke depan perlu lebih diarahkan pada manfaat kegiatan, bukan hanya serapan anggaran,” (Wawancara Sekretaris Kecamatan Maiwa).

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja di Kantor Kecamatan Maiwa telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendalaman pemahaman teknis terkait pengukuran kinerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kompetensi aparatur dalam menerapkannya secara konsisten.

Pembahasan

Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ditentukan dari siklus anggaran menurut Mardiasmo (2011: 70) yang meliputi tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap implementasi anggaran serta tahap pelaporan dan evaluasi anggaran yang disesuaikan dengan output dan outcome. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang RPJPD Tahun 2008-2028 yang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Enrekang.

1. Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Kantor Kecamatan Maiwa terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun pembahasan hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa dilakukan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Maiwa sebagai pengguna anggaran dan mengutamakan pencapaian hasil kinerja.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 RKPJP, RPJMPD dan RKPD disusun dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan yang di lakukan di tahap ratifikasi.

Sistem penganggaran yang digunakan berbasis aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Standar biaya sebagai patokan dalam penyusunan anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa meliputi standar biaya belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, sasaran, target serta strategi organisasi dalam tersedianya informasi finansial yang lengkap untuk digunakan sebagai penyusunan anggaran pada

rapat kerja anggaran.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap ratifikasi anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa tidak menemukan adanya hambatan dari masalah penganggaran dan waktu pengesahan telah sesuai dengan rencana implementasi anggaran serta alasan yang disampaikan dalam pengesahan telah sesuai dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan standar kerja yang telah ditetapkan.

c. Tahap Implementasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap implementasi anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa terdapat Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan program atau aplikasi komputer dengan total anggaran yang sudah tercatat dalam sistem. Pada tahap implementasi, pengalokasian anggaran untuk semua program disesuaikan dengan Renstra, Renja serta kegiatan yang dilakukan.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran di Kantor Kecamatan Maiwa sangat memperhatikan akuntabilitas suatu anggaran dalam bentuk laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja anggaran. Hasil dari pelaporan dan evaluasi anggaran sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, apabila sistem tersebut terlaksana dengan baik maka akan menghasilkan laporan yang baik dan sesuai dengan rencana. Laporan realisasi Kantor Kecamatan Maiwa telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan serta mendorong aparaturnya untuk selalu meningkatkan kinerja.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Berupa Kinerja

Kantor Kecamatan Maiwa tahun 2020 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Standar Biaya yang digunakan untuk capaian kinerja di Kantor Kecamatan Maiwa adalah Standar Biaya Keluaran yang estimasi dasar pengajuan anggaran yang disesuaikan dengan melihat kewajaran masing-masing komponen biaya. Adapun pembahasan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Output (Keluaran)

Dijelaskan bahwa output dalam Implementasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang terlampir pada tabel 5.3 telah sesuai dengan target dan realisasi atas capaian masing-masing kegiatan. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja. Realisasi keluaran capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 100% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Adapun penjelasan tentang output setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya urusan pelimpahan kewenangan kabupaten di kecamatan berupa pemungutan PBB yang dilaksanakan di 21 Desa/1 Kelurahan.
- 2) Terselenggaranya administrasi perkantoran sarana dan prasarana dan pembinaan SDM aparat perangkat daerah di Kecamatan Maiwa terdiri atas 1 Kelurahan yang mendapatkan BOP, 15 orang pegawai yang lulus, 120 kali rapat koordinasi dan konsolidasi, pemeliharaan 1 unit gedung kantor, pemeliharaan 4 unit kendaraan dinas, pemeliharaan 5 jenis peralatan gedung kantor, pemeliharaan 1 unit rumah jabatan, 4 dokumen administrasi keuangan dan perkantoran, 3 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia, 12 jenis komponen instalasi listrik yang tersedia, 2 jenis peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur serta 3 kali rapat koordinasi konsultasi keluar daerah.

- 3) Terselenggaranya penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja perangkat daerah terdiri atas 1 dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun, 1 dokumen DPA, 1 dokumen laporan capaian kinerja, 1 dokumen rencana kerja serta 1 dokumen RKA.
 - 4) Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Maiwa berisi 1 dokumen evaluasi RAPBDes, aparat 21 Desa/ 1 Kelurahan yang dibina, 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan keuangan, 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam perencanaan keuangan, 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam pelaksanaan kegiatan, 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam pelaporan keuangan serta 21 Desa/1 Kelurahan yang dibina dan diawasi dalam evaluasi ADD.
 - 5) Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kecamatan dan koordinasi kegiatan perangkat daerah di Kecamatan Maiwa berisi 1 dokumen musrenbang, 8 kasus pertanahan yang diselesaikan, 1 organisasi yang menangani kemiskinan, 80 orang peserta paskibra dan 21 Desa/1 Kelurahan penanganan/pemeliharaan kantribmas..
 - 6) Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di Kecamatan Maiwa yaitu 1 Kelurahan..
- b. Outcome (Hasil)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian outcome di Kantor Kecamatan Maiwa sudah dikatakan baik dari 6 program dan 31 kegiatan dengan target hasil pencapaian setiap kegiatan mendapatkan hasil yang memuaskan. Adapun penjelasan tentang outcome setiap kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya urusan pelimpahan kewenangan kabupaten di Kecamatan Maiwa dengan tercapainya target PBB dan PAD yang tepat waktu.
- 2) Terselenggaranya administrasi perkantoran sarana dan prasarana dan pembinaan SDM aparat perangkat daerah dengan berjalannya kegiatan operasional kantor, meningkatnya kompetensi dan pengetahuan aparatur, berjalannya fungsi koordinasi dan konsolidasi dalam daerah, tersedianya gedung kantor yang memadai, kendaraan dinas dalam kondisi layak pakai dan layak jalan, tersedianya alat penunjang pelayanan yang memadai, tersedianya rumah jabatan dinas yang memadai, terwujudnya pengelolaan keuangan dan administrasi, terciptanya kondisi kantor yang nyaman, bersih dan tertata rapi, terciptanya tugas dan fungsi kantor pelayanan, terciptanya sistem penerangan kantor yang optimal, serta berjalannya tugas dan fungsi organisasi pemerintahan.
- 3) Terselenggaranya penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja perangkat daerah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, terwujudnya DPA yang sesuai APBD, terwujudnya akuntabilitas kinerja kecamatan, terwujudnya peningkatan kualitas program/kegiatan yang terkoordinir serta meningkatnya sistem perencanaan yang sesuai anggaran..
- 4) Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dengan terbentuknya peraturan desa yang lebih akurat, terciptanya penyelenggaraan pemerintah desa, terwujudnya pengelolaan keuangan desa, terwujudnya perencanaan keuangan desa, terciptanya pelaksanaan kegiatan dana desa, terwujudnya pelaporan keuangan serta terbentuknya ADD yang akurat.
- 5) Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kecamatan dan koordinasi kegiatan perangkat daerah di Kecamatan Maiwa dengan tersusunnya dokumen hasil musrenbang tahunan kecamatan, terselesaikannya permasalahan konflik pertanahan, terwujudnya peningkatan kualitas program/kegiatan yang terkoordinir, terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan, olahraga dan seni serta terwujudnya keamanan dan ketertiban.
- 6) Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan tersedianya sarana dan prasarana Kelurahan Bangkala yang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan dengan baik pada seluruh tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan, ratifikasi, implementasi, hingga pelaporan dan evaluasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian [3] serta [4] yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja organisasi perangkat

daerah apabila didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi dan sistem pengendalian yang memadai.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung temuan [5] yang menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui keterkaitan yang jelas antara perencanaan program, alokasi anggaran, serta capaian kinerja. Pada konteks Kantor Kecamatan Maiwa, keterkaitan tersebut tercermin dari kesesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi anggaran, serta pencapaian output dan outcome kegiatan.

Namun demikian, temuan penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian [6] serta [7] yang mengungkapkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pemahaman aparatur terhadap pengukuran kinerja. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi, termasuk kompetensi aparatur dan dukungan sistem informasi pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja tidak dapat diseragamkan antar instansi pemerintah. Keberhasilan penerapan sistem ini pada Kantor Kecamatan Maiwa menunjukkan bahwa dengan dukungan regulasi, sistem pengendalian, serta komitmen aparatur, anggaran berbasis kinerja dapat diimplementasikan secara efektif hingga pada tingkat pemerintahan kecamatan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, informan penelitian terbatas pada aparatur internal Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini belum melibatkan masyarakat sebagai informan, sehingga penilaian terhadap capaian outcome masih didasarkan pada perspektif internal pemerintah. Kedua, penelitian ini lebih menekankan pada analisis proses implementasi anggaran berbasis kinerja sesuai dengan siklus anggaran dan regulasi yang berlaku, sehingga belum secara mendalam mengkaji persepsi masyarakat terhadap dampak program dan kegiatan yang dilaksanakan. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas anggaran berbasis kinerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik. Seluruh tahapan siklus anggaran, mulai dari tahap persiapan, ratifikasi, implementasi, hingga pelaporan dan evaluasi anggaran, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan anggaran telah memperhatikan keterkaitan antara perencanaan program, indikator kinerja, serta alokasi anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian output dan outcome yang terukur. Tingkat realisasi anggaran yang mencapai target serta tercapainya output dan outcome kegiatan menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja telah menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengukuran kinerja, agar evaluasi anggaran tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada efektivitas dan manfaat program bagi masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang**
Diharapkan agar terus meningkatkan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja melalui penguatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pemahaman indikator kinerja serta pengukuran outcome kegiatan. Selain itu, evaluasi kinerja anggaran perlu lebih diarahkan pada analisis manfaat program dan kegiatan, bukan hanya pada tingkat realisasi anggaran.
- 2. Bagi Pemerintah Daerah**
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan terkait penganggaran berbasis kinerja, serta memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi kinerja pada seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan.
- 3. Bagi Peneliti Selanjutnya**
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan

lain sebagai informan, sehingga penilaian terhadap capaian outcome anggaran berbasis kinerja dapat lebih komprehensif. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan metode yang berbeda untuk memperkaya kajian akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [3] Bastian, I. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- [4] Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- [5] Aliyuddin, R. S. "Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu)." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, vol. 3, no. 2, 2016.
- [6] Nanda, R., & Darwanis. "Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 1, no. 1, pp. 327–340, 2016.
- [7] Sofyani, H., & Prayudi, M. A. "Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja 'A'." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, vol. 13, no. 1, 2018.
- [8] Pratama, A., & Handoko, B. "Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol. 2, no. 2, 2018.
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [12] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- [13] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga